



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Desain Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dalam Rangka Akuntabilitas di Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta

Pujiyanti¹. Setyo Hari Wijanto²

^{1,2}Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstract. *The purposes of this study are to identify and analyze the needs of the inventory accounting information system in the context of accountability in the Jakarta Provincial Office of Communication and Information, starting from the preparation of the Unit Goods Needs Plan (RKBU), budgeting, receipt, distribution, and reporting. Currently, the management procedure and inventory recording are still manual with the Item Card facility, so that there is the potential for errors in recording. Whereas accountability in government agencies is highly highlighted because it is the accountability of public funds, especially in this era of rapid technological development, the use of information systems is a necessity for the organization. System analysis and design are carried out using accountability theory, accounting information systems, inventory accounting in government, and internal controls related to the organization and current inventory accounting procedures. The results achieved are the design of data flow diagrams, entity relationship diagrams, and the required relational databases.*

Keywords: *Accounting Information Systems; Inventory Accounting; Government Accounting, Accountability*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sistem informasi akuntansi persediaan dalam rangka akuntabilitas di Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, mulai dari penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), penganggaran, penerimaan, distribusi dan pelaporannya. Saat ini prosedur pengelolaan dan pencatatan persediaan masih manual dengan sarana Kartu Barang, sehingga berpotensi terjadi kesalahan dalam pencatatan. Padahal akuntabilitas dalam instansi pemerintah sangat disorot karena merupakan pertanggungjawaban dana masyarakat, terutama di era perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan pesat ini penggunaan sistem informasi merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi. Analisis dan perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan teori akuntabilitas, sistem informasi akuntansi, akuntansi persediaan dalam pemerintahan, dan pengendalian internal yang terkait dengan organisasi dan prosedur akuntansi persediaan yang ada saat ini. Hasil yang dicapai adalah desain *data flow diagram (DFD)*, *entity relationship diagram (ERD)*, dan *database relational* terkait akuntansi persediaan yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Pemerintahan, Akuntabilitas.

Corresponding author. Email : pujiyanti058@gmail.com.

How to cite this article. Pujiyanti, Setyo Hari Wijanto. 2018. Desain Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dalam Rangka Akuntabilitas di Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 6(3), 361–372. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670>

History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4670

Copyright©2018. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinas Kominfo) Provinsi DKI Jakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah pemerintahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebagai salah satu instansi pemerintah, akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dicapai sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada publik dalam pengelolaan dana masyarakat. Pada tahun 2017, akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 memperoleh predikat B atau 60,3 % dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, meskipun sudah dikategorikan baik namun masih perlu disempurnakan agar lebih baik lagi (Sumber : www.beritajakarta.com).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2015) organisasi sektor publik pada umumnya belum mampu menunjukkan tingkat akuntabilitas secara optimal karena organisasi sektor publik belum sepenuhnya mampu memberikan pertanggungjawaban yang mumpuni atas penggunaan sumber daya publik dalam menjalankan kebijakan, program, kegiatan dan aktivitas rutinnya. Salah satu sumber daya publik tersebut adalah persediaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta membutuhkan persediaan yang dalam hal ini merupakan bahan pakai habis sebagai sarana penunjang pelaksanaan penatausahaan dinas. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Pengurus Barang diketahui bahwa terkait persediaan Dinas Kominfo mengalami kesulitan saat pengusulan rencana kebutuhan barang sebagai dasar penganggaran dan pendistribusian. Padahal, pengelolaan persediaan yang baik sesuai dengan peraturan akan menghasilkan saldo persediaan akhir yang akurat pada setiap akhir periode akuntansi.

Suwarjono & Ritonga (2017) menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan

akun persediaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jawa masih rendah dan belum disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). LKPD merupakan laporan gabungan seluruh SKPD yang berada di bawah Pemerintah Daerah, sehingga akuntabilitas akun persediaan pada laporan keuangan SKPD sangat penting karena merupakan bagian elemen dalam LKPD yang tidak dapat dipisahkan. Penerapan teknologi informasi dalam akuntansi persediaan dapat dijadikan alternatif dalam pengelolaan persediaan SKPD, sehingga prosedurnya dapat lebih efektif dan efisien serta menghasilkan informasi saldo akhir persediaan yang lebih akurat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan persediaan, berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 45 Tahun 2017 sebagai salah satu bentuk tindak lanjut atau respon atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan upaya optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan mengembangkan aplikasi pengelolaan persediaan sesuai kebutuhan yang terintegrasi dengan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2018 Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi untuk membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi yang diperlukan dan digunakan untuk keberlangsungan pemerintahan dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta juga merupakan SKPD pemberi rekomendasi kepada SKPD lain, UKPD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin membangun dan mengembangkan sistem informasi sendiri.

Sesuai dengan latar belakang tersebut dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1) Bagaimana usulan prosedur

pengelolaan persediaan di Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta? dan 2) Bagaimana usulan desain sistem informasi akuntansi persediaan di Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta?

Dengan demikian berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sistem informasi akuntansi persediaan dalam rangka akuntabilitas di Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, mulai dari penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU sebagai dasar penganggaran, penerimaan, distribusi dan pelaporannya. Fokus dalam penelitian ini adalah analisis sistem informasi akuntansi persediaan yang terdiri dari standar operasional prosedur, perancangan *data flow diagram* (DFD), *entity relationship diagram* (ERD), dan *relational database*.

KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen *good governance* yang akan dicapai oleh instansi pemerintahan sehubungan dengan penggunaan dana publik. Menurut Osborne (2006), akuntabilitas lebih dari sekadar menjalankan pengendalian terhadap organisasi dan program publik, akuntabilitas juga merupakan pedoman bagi organisasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Sedangkan menurut Turner & Hulme (1997) akuntabilitas adalah wajib untuk instansi publik agar lebih menekankan pertanggungjawaban secara horizontal, yaitu kepada masyarakat bukan hanya pertanggungjawaban secara vertikal, yaitu otoritas yang lebih tinggi. Dengan demikian, akuntabilitas adalah pedoman pengendalian terhadap organisasi dan lembaga sektor publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dengan menekankan pertanggungjawaban secara horizontal (masyarakat) lebih dari pertanggungjawaban secara vertikal (otoritas lebih tinggi). Sebagai instansi pemerintahan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, akuntabilitas

merupakan sasaran yang harus dicapai. Hasilnya kepada para pembuat pengambil keputusan.

Pengelolaan dan Akuntansi Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan PSAP No. 5 klasifikasi persediaan yang sesuai dengan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta adalah Persediaan terdiri dari barang pakai habis atau perlengkapan yang diperoleh untuk disimpan dan digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor. Sejalan dengan definisi tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 161 Tahun 2017 pengertian persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta yang termasuk persediaan adalah perlengkapan yang terdiri dari alat tulis kantor, lembar pengantar, lembar disposisi, toner / cartridge tinta printer, ban kendaraan, aki kendaraan, dan lain-lain.

Persediaan dicatat berdasarkan metode perpetual, di mana persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan. Sedangkan untuk persediaan yang nilainya kurang material dan beraneka ragam jenisnya, seperti alat tulis kantor digunakan Harga Pembelian Terakhir.

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 103 Tahun 2014 pengelolaan persediaan dalam konteks Dinas Kominfotik dan penelitian ini mencakup perencanaan kebutuhan (RKBU) yang menjadi dasar penganggaran, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, dan penatausahaan persediaan. Tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh pengurus barang, sehingga pengurus barang tidak hanya mengelola aset tetap saja tetapi juga persediaan.

RKBU merupakan sarana penyusunan rencana kebutuhan barang SKPD / UKPD dengan mempertimbangkan ketersediaan

barang yang ada sebelumnya. Penyusunan RKBU dilakukan berdasarkan pedoman standar yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur berkenaan dengan sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah. RKBU yang telah disusun SKPD/UKPD disampaikan kepada Badan Pengelola Aset Daerah yang diberi wewenang oleh Sekretaris Daerah sebagai Pengelola. Dalam konteks penelitian ini dibatasi proses RKBU sampai dengan diserahkan kepada pengelola, untuk penganggaran dan pengadaan tidak termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian ini. Proses selanjutnya yang menjadi cakupan dalam penelitian ini adalah hasil proses hasil pengadaan persediaan yang merupakan penambahan terhadap persediaan yang dikelola oleh pengurus barang. Lebih lanjut proses pencatatan permintaan barang dan penyusunan laporan persediaan sebagai dasar penjumlahan beban pemakaian persediaan juga tercakup dalam penelitian ini.

Sistem Informasi Akuntansi

Romney & Steinbart (2015) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem untuk memfasilitasi serangkaian aktivitas yang terdiri dari pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang bernilai sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem ini meliputi komponen yang terdiri dari orang atau user atau entitas, serangkaian kebijakan, prosedur dan instruksi, data, software atau perangkat lunak, hardware atau infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal. Menurut Wilkinson, Cerullo, Raval, & Wong-On-Wing, (2000) sistem informasi akuntansi adalah kerangka untuk mengkoordinasikan input yang merupakan sumber daya (data, bahan baku, peralatan, supplier, manusia, dan keuangan) untuk mengkonversi atau memproses input yang berupa data ekonomik menjadi output berupa informasi akuntansi untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi stakeholder. Dengan demikian sistem informasi akuntansi adalah suatu kerangka pengkoordinasian sumber daya dalam suatu

sistem untuk pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi akuntansi yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Analisis Terstruktur dalam Perancangan Sistem Informasi

Menurut Whitten & Bentley (2007) analisis terstruktur adalah model-driven, teknik terpusat yang digunakan baik untuk menganalisis sistem telah ada atau menentukan kebutuhan bisnis akan sistem atau keduanya. Modelnya menggunakan gambar untuk mengilustrasikan komponen-komponen sistem yaitu proses dan keterkaitannya dengan input, output dan file. Analisis terstruktur difasilitasi dengan alat dan teknik untuk pengembangan sistem informasi, sehingga akan diperoleh sistem informasi yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas.

Melalui analisis terstruktur, permasalahan yang rumit dapat dipecahkan dan ditemukan solusi yang tepat sehingga hasil dari informasi sistem akan mudah untuk dikelola, fleksibel, bermanfaat, terdokumentasi dengan baik, tepat waktu, serta sesuai analisis cost and benefit yang telah dilakukan.

Structured Project Life Cycle

Menurut Yourdon terdapat sembilan tahapan dalam *Structured Project Life Cycle* yang digambarkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut : *survey, system analysis, design, implementation, acceptance test generation, quality assurance, procedure description, database conversion, dan installation*. Namun, dalam penelitian ini dibatasi hanya sampai design saja.

Survey juga dikenal dengan studi kelayakan atau studi pendahuluan dalam bisnis. Tujuan pertama dari kegiatan survey adalah mengidentifikasi tanggung jawab user dan mengembangkan scope awal sistem. Pada proses ini dilakukan rangkaian wawancara untuk mengetahui user yang terlibat dalam sistem dan pembuatan diagram konteks. Tujuan kedua yaitu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan pada lingkungan organisasi user, biasanya berupa narasi

seederhana fungsi-fungsi yang belum ada atau operasional yang kurang sesuai. Tujuan ketiga yaitu menetapkan sasaran dan tujuan pengembangan sistem, berupa narasi fungsi yang telah ada dan diimplementasikan, fungsi baru yang ditambahkan dan kriteria performance dari sistem yang dikembangkan. Tujuan keempat adalah menentukan apakah layak untuk mengotomatisasi sistem, jika layak membuat usulan skema pengembangan sistem seperti jadwal timeline, biaya, dan keuntungannya. Tujuan kelima adalah menyiapkan pedoman dalam pengembangan sistem informasi akuntansi.

System analysis bertujuan untuk menganalisis aktivitas yang akan mentransformasi dua inputan utama : kebijakan user dan project charter menjadi spesifikasi terstruktur. Tahapan ini berupa modeling lingkungan bisnis organisasi user dengan menggunakan data flow diagram (DFD) , entity relationship diagram (ERD), state transition diagram, dan teknik permodelan lainnya.

Design, fokus dari aktivitas ini adalah transformasi entity relationship diagram menjadi desain database. Data Flow Diagram (DFD) adalah alat perancangan model yang menggambarkan sistem informasi sebagai suatu jaringan proses fungsional yang saling terkait satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun terkomputerisasi. DFD ini merupakan alat perancangan sistem informasi yang berorientasi pada aliran data dengan konsep dekomposisi. Entity Relationship Diagram (ERD) adalah alat pembuatan model database yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi. ERD menunjukkan hubungan dari entitas yang disimpan dalam database. Entitas dalam konteks ini adalah pengguna sistem informasi. Dengan demikian dapat dikatakan ERD menggambarkan struktur logis dari database. Relational Database Database merupakan Database Management System (DBMS) yang memberikan gambaran atau skema yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Stake (2008) menjelaskan studi kasus adalah salah metode penelitian yang bertujuan dalam meneliti dan mengungkap keunikan serta kekhasan karakteristik yang terdapat dalam kasus atau fenomena yang diteliti, kasus atau fenomena tersebut menjadi alasan dan motivasi mengapa penelitian dilakukan. Stake menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam penelitian studi kasus perlu dilakukan penggalian informasi dan analisis secara mendalam, detil, dan rinci mengenai segala hal yang berkaitan dengan kasus atau fenomena yang diteliti. Menurut Creswell (2009) studi kasus adalah proses eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari masa ke masa melalui pengumpulan data dan informasi yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dan bernilai tinggi.

Triangulation method digunakan pada pendekatan data penelitian dan teknik pengumpulan data. Tipe data yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan perancangan sistem informasi akuntansi persediaan di Dinas Kominfo DKI Jakarta adalah data kuantitatif dan kualitatif berupa data primer dan sekunder. Data kuantitatif diantaranya berupa jumlah persediaan dan nilai persediaan, sedangkan data kualitatif berupa teori, dan konsep yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis data. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggabungkan observasi, wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer, observasi dan studi pustakan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data-data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan konten analisis.

Gambaran Umum Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta

Objek penelitian ini merupakan *single unit analysis*, yaitu Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Gedung Balaikota Blok G Lt. 13, Jl, Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Jakarta Pusat. Visi Dinas Kominfo adalah Mewujudkan Jakarta Maju dengan layanan publik berbasis IT (*smart city*) yang menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif. Misi Dinas Kominfo adalah Mengembangkan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi publik berkelas dunia, mengembangkan e-government dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman, dan mengembangkan SDM serta sarana & prasarana layanan yang unggul.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Pasal 8 huruf (i) dan (j), tugas dan fungsi pengelolaan persediaan menjadi tanggung jawab Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta melalui pengurus barang. Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta memiliki lima bidang, satu sekretariat dan dua unit pelaksana teknis dengan jumlah sub bagian atau seksi sebanyak 21.

Kondisi Pengelolaan Persediaan Saat ini

Perencanaan kebutuhan persediaan Dinas Kominfo disusun satu tahun sebelum Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) disahkan atau sesuai dengan surat edaran atau instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya pada jangka waktu tertentu. Sub Bagian Umum mengedarkan form RKBU kepada setiap seksi dan sub bagian untuk diisi. Formulir RKBU tersebut kemudian direkapitulasi untuk diinput ke sistem *ebudgeting* untuk proses penganggaran. Namun, dalam prosesnya formulir-formulir RKBU ini kerap kali terkumpul saat batas waktu penganggaran dan belum sempat direkapitulasi serta tidak disesuaikan dengan jumlah stok persediaan akhir dan menambahkan stok untukantisipasi kondisi tertentu seperti terlambatnya pengesahan APBD dan proses pengadaan, sehingga untuk mempermudah RKBU disamakan dengan

tahun sebelumnya. Hal ini tentu kurang baik, karena belum tentu kebutuhan akan persediaan sama dengan tahun sebelumnya, bisa jadi salah satu persediaan stoknya berlebih dan yang lainnya kekurangan. Penyesuaian RKBU juga perlu dilakukan jika terdapat pengurangan dan penambahan plafon anggaran pembelian persediaan.

Karena kerap kali RKBU disamakan dengan tahun sebelumnya, pendistribusian persediaan terkendala tidak meratanya distribusi persediaan ke seluruh seksi atau sub bagian, karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Selain itu, Meskipun RKBU telah disusun namun karena RKBU tidak terdokumentasikan dengan baik, permintaan barang oleh sub bagian atau seksi tidak sesuai dengan dengan RKBU yang telah disusun sebelumnya, sehingga terdapat permasalahan dalam proses pendistribusian. Pada tahun 2018 ini Dinas Kominfo memiliki 116 jenis persediaan yang dikelola oleh pengurus barang. Nilai persediaan akhir pada tahun 2017 adalah Rp 475.917.853,00 dan nilai anggaran persediaan pada tahun 2018 adalah lebih Rp 500.000.000,00, dengan demikian pada tahun 2018 Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta mengelola persediaan dengan total hampir satu milyar, jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik penggunaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan perancangan sistem informasi persediaan ini berdasarkan Structured Project Life Cycle yang dikemukakan oleh Yourdon (1989) pada aktivitas survey dilakukan wawancara dan observasi sehingga diketahui kondisi pengelolaan persediaan saat ini, selanjutnya dianalisis sehingga dapat disusun usulan standar operasional prosedur pengelolaan dan akuntansi persediaan di Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta seperti dikemukakan di bawah ini.

Prosedur pengelolaan persediaan pada Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta dimulai dari penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) yang diisi oleh setiap sub bagian atau

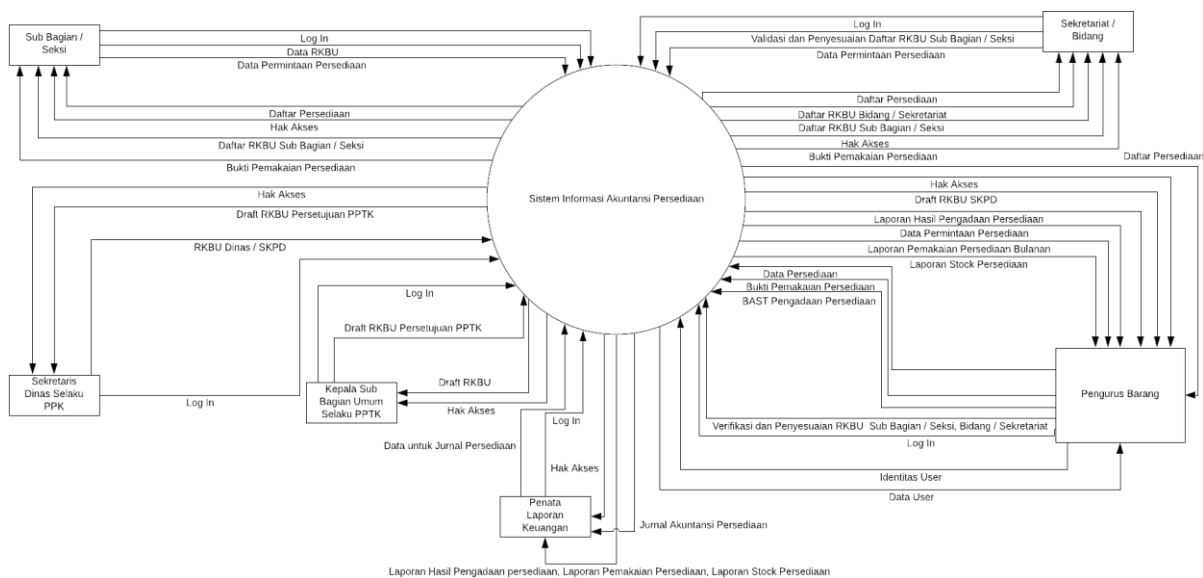
seksi berdasarkan kebutuhan staf dan kebutuhan barang yang sifatnya bersama. Dari tingkat seksi atau sub bagian RKBU direkapitulasi dan ditambahkan barang kebutuhan pada tingkat bidang sehingga diperoleh RKBU tingkat bidang. RKBU tingkat bidang direkapitulasi kembali oleh pengurus barang dan dilakukan penyesuaian dengan melakukan pengurangan saldo persediaan akhir dan menambahkan stok cadangan sehingga disebut Draft RKBU SKPD / Dinas. Kemudian, Draft RKBU SKPD / Dinas ini diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Sub Bagian Umum selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kemudian diinput pada sistem perencanaan dan penganggaran e-budgeting. Sistem e-budgeting merupakan sistem tersendiri yang digunakan untuk perencanaan dan penganggaran oleh seluruh SKPD dan UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk proses pengadaan tidak menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, hasil dari pengadaan persediaan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) pengadaan persediaan dari PPK ke pengurus barang yang akan digunakan sebagai bahan dalam penambahan persediaan.

Pengurus Barang melakukan pencatatan penambahan persediaan berdasarkan BAST

pengadaan sedangkan pencatatan pengurangan persediaan berdasarkan formulir permintaan barang dari para sub bagian atau seksi. Formulir permintaan barang akan dicocokkan dengan RKBU yang telah diisi sebelumnya jika sesuai akan diserahkan persediaan sesuai dengan permintaan, jika tidak sesuai maka item persediaan pada RKBU lah yang menjadi dasar pengeluaran persediaan.

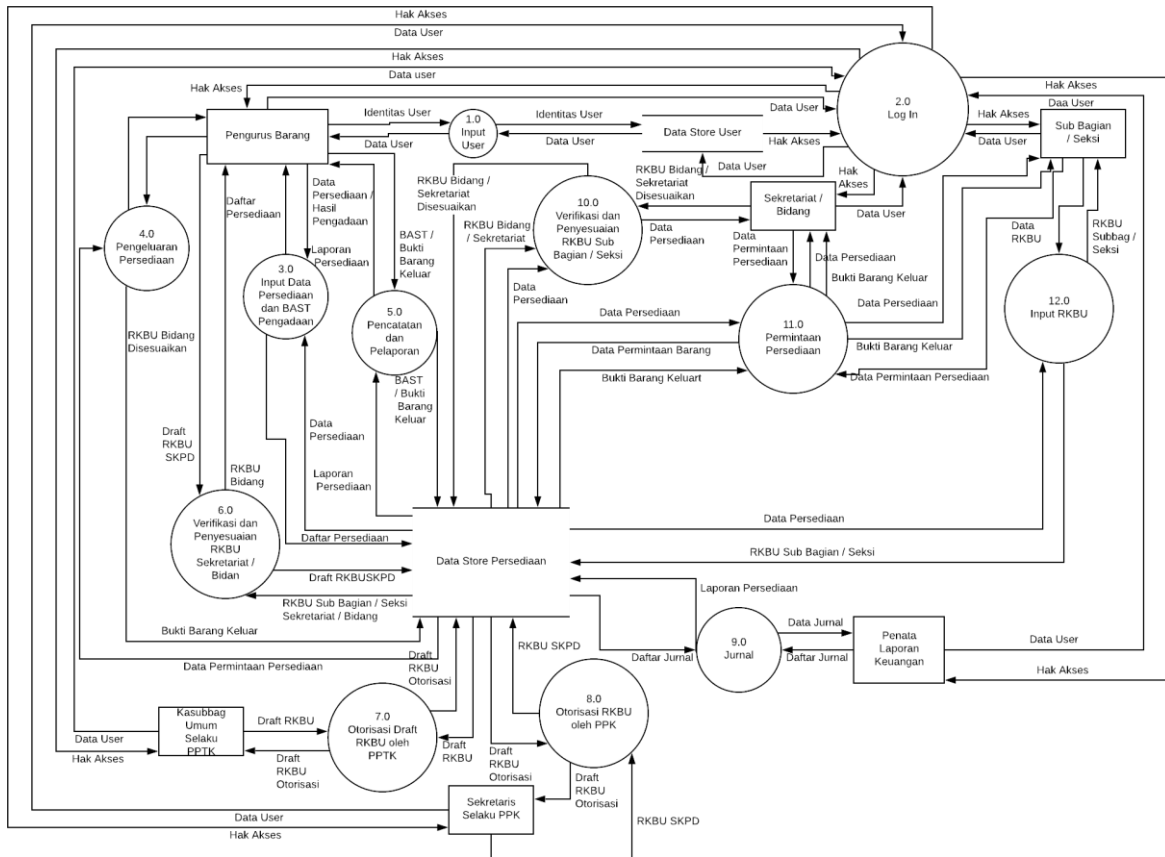
Setiap penambahan dan pengurangan akan dicatat dan dijurnal sebagai beban persediaan berdasarkan formulir permintaan barang yang telah diotorisasi oleh pengurus barang. Saldo per item persediaan akan direkapitulasi setiap bulan untuk mengetahui saldo akhir per bulan dan beban pemakaian persediaan.

Tahapan selanjutnya setelah survey adalah analisis sistem dengan perancangan data flow diagram (DFD), terdiri dari diagram konteks dan diagram level 0. DFD dibuat untuk mengetahui data-data atau dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dan bagaimana alur data mengalir dari pengguna (entitas) ke sistem informasi yang akan didesain dan sebaliknya. Tahapan selanjutnya setelah DFD adalah perancangan entity relationship diagram (ERD). Untuk tahap desain mentransformasi desain dalam analisis sistem menjadi relational *database*.



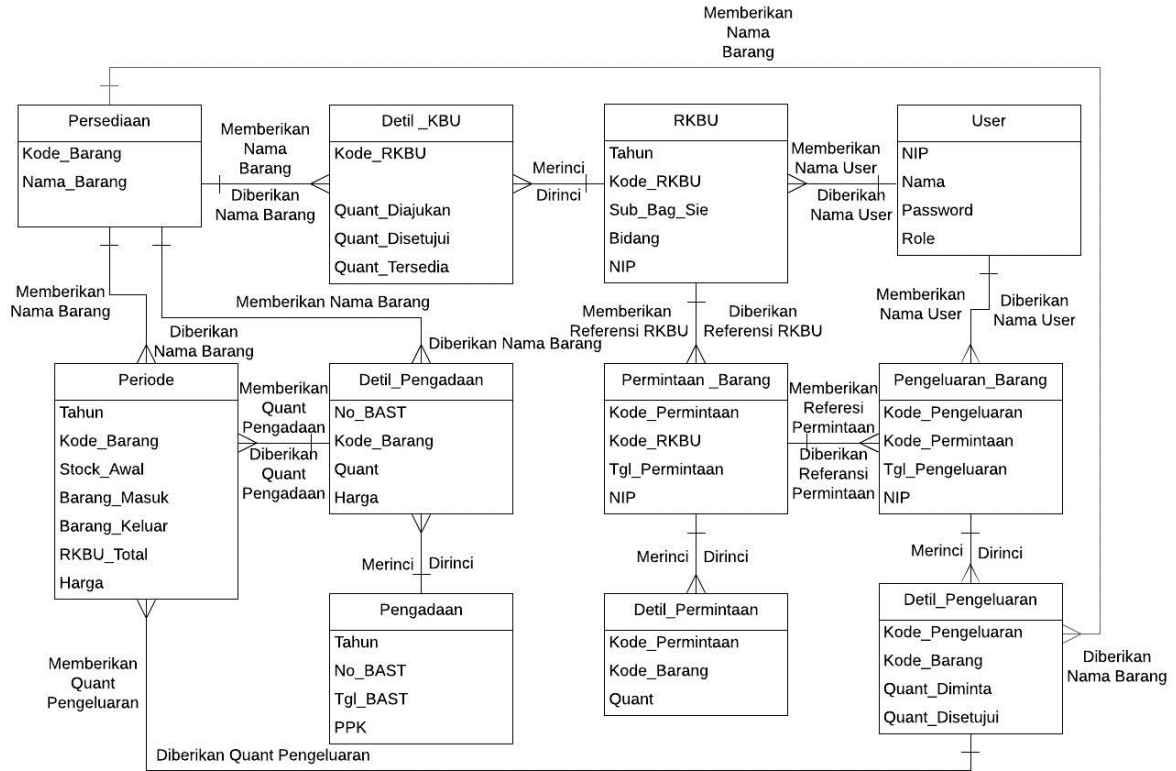
Sumber : Hasil Analisis

Gambar 1 : Usulan DFD Diagram Konteks Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta



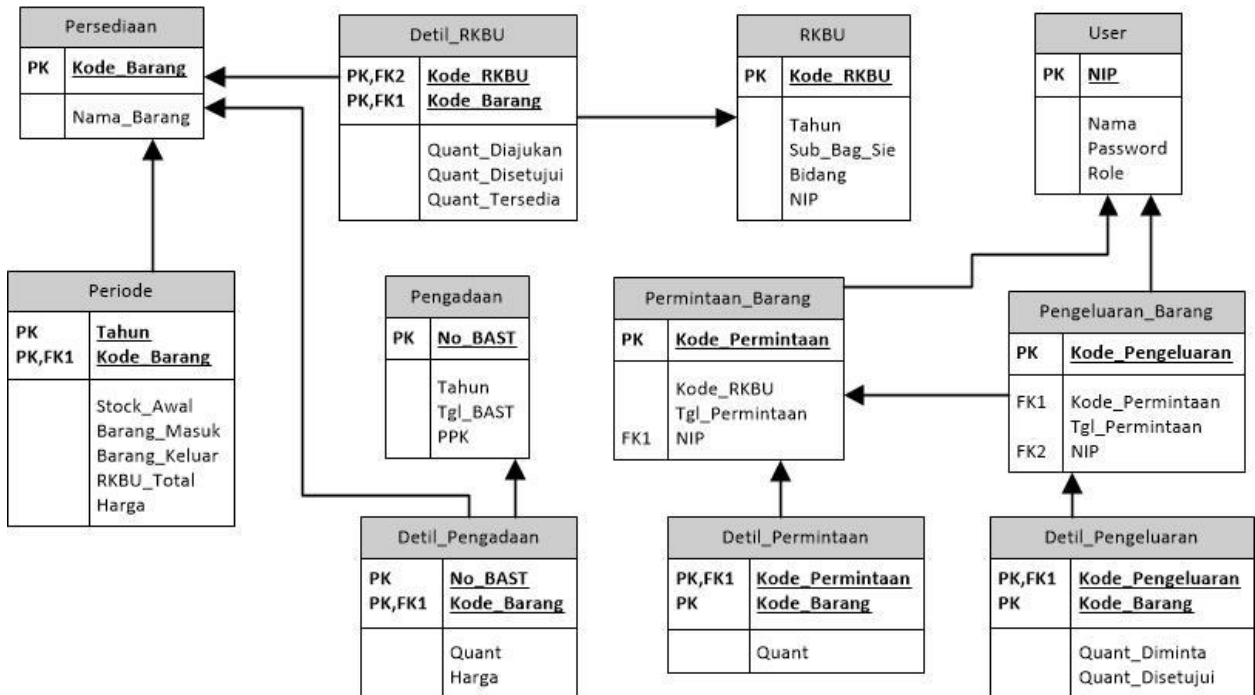
Sumber : Hasil Analisis

Gambar 2. Usulan DFD Level 0 Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Hasil Analisis

Gambar 3. Usulan ERD Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Dinas Kominfo DKI Jakarta



Sumber : Hasil Analisis

Gambar 4. Desain Relational Database Sistem Akuntansi Persediaan Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta

SIMPULAN

Pengelolaan persediaan di Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta masih belum maksimal, masih terdapat keterbatasan dikarenakan prosedur pengelolaan dan penatausahaan persediaan masih dilakukan secara manual. Kartu persediaan yang dijadikan sebagai sarana pencatatan belum memuat informasi kepada siapa saja persediaan didistribusikan. Pencatatan beban persediaan karena pemakaian persediaan juga belum akurat perhitungannya dan belum dilakukan secara berkala. Oleh karena itu dengan adanya desain sistem informasi ini diharapkan dapat membantu Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta dalam membangun aplikasi pengelolaan dan pencatatan akuntansi persediaan, sehingga lebih efektif, efisien dan akurat dan upaya meningkatkan akuntabilitas di Dinas Kominfo serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilakukan.

Penulis memiliki keterbatasan dalam bahasa pemrograman, untuk itu penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini sampai dengan proses pembuatan dan implementasi aplikasi akuntansi persediaan ini dengan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta atau pun instansi pemerintah lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menjadikan pengelolaan dan akuntansi aset sebagai bahan penelitian, yang dalam prosedurnya memiliki banyak kesamaan dengan pengelolaan dan akuntansi persediaan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2009). *Research design. Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*.
<https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Dokumen Renstra Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta

Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan. Indonesia.

Indonesia (2007). Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (2007).

Indonesia, (2018). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 103 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Serta Penganggarnya.

Indonesia, (2018). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Indonesia.

Indonesia, 2017. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 45 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Persediaan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Indonesia, 2017. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi.

Kaban, J. S. P. (2017). Akuntabilitas Kinerja Pemprov DKI Raih Predikat B. Retrieved from http://www.beritajakarta.id/read/45029/Akuntabilitas_Kinerja_Pemprov_DKI_Raih_Predikat_B#.W9qtOIUzbiU diakses pada tanggal 15 Oktober 2018

Laporan Keuangan Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? *Public Management Review*, 8(3 2006), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting Information System* (13th ed.). New York: Pearson.

Stake, R. E. (2008). Case Studies. In *Strategies of Qualitative Inquiry*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12->

384919-9.00009-X

- Suwarjono, P., & Ritonga, I. T. (2017). Analisis Tingkat Pengungkapan Akun Persediaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 173–188.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/JDAB.V4I2.6338>
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration & Development : Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.
- Whitten, J. L., & Lonnie D. Bentley. (2007). *Systems Analysis and Design Methods*. McGraw-Hill.
<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(Mei 2015), 17–26.
- Wilkinson, J. W., Cerullo, M. J., Raval, V., & Wong-On-Wing, B. (2000). *Accounting Information System : Essential Concepts and Application* (4th ed.). New Jersey: John Willey and Son, Inc.
- Yourdon, E. (1989). *Modern Structured Analysis*. New Jersey: Prentice Hall Inc.